

**TRANSFORMASI IDENTITAS ISLAM PASCAPEMBENTUKAN
PROVINSI GORONTALO**



Oleh :
Eka Putra B Santoso
NIM : 1520310012

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Putra B.Santoso,SE
NIM : 1520310012
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 22 Mei 2017
Saya yang menandatangani




Eka Putra B. Santoso, SE
NIM: 150310012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eka Putra B.Santoso,SE
NIM : 1520310012
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2017

Saya yang menyatakan




Eka Putra B. Santoso, SE.

Nim : 1520310012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-185/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : "TRANSFORMASI IDENTITAS ISLAM PASCA PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA PUTRA BUDIADI SANTOSO, S.E.
Nomor Induk Mahasiswa : 1520310012
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Yogyakarta, 18 Mei 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
YOGYAKARTA



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'a. 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TRANSFORMASI IDENTITAS ISLAM PASCAPEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO

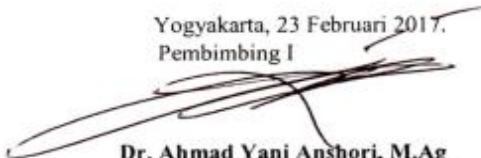
Yang ditulis oleh :

Nama : Eka Putra B. Muhammad Santoso, SE
Nim : 1520310012
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2017.
Pembimbing I


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag
NIP.19731105 199603 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'a. 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan , dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

TRANSFORMASI IDENTITAS ISLAM PASCAPEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO

Yang ditulis oleh :

Nama : Eka Putra B. Muhammad Santoso, SE
Nim : 1520310012
Prodi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamualaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Februari 2017.
Pembimbing H



Prof. Dr. H. Kamst, M.A
NIP.19570207 198703 1 003

ABSTRAK

Mekarnya provinsi Gorontalo pada tahun 2000 secara umum membawa angin segar pada identitas kegorontaloan yang mulai terkikis, fenomena Islam pun sebagai Identitas kultural yang dibangun selama Gorontalo berdiri juga memperlihatkan transformasinya dari jaman kerajaan hingga hari ini. Penelitian ini akan menjawab bagaimana transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo secara struktural kekuasaan dan kultural budaya Islam itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terjadi transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo dan untuk melihat bangunan identitas Islam yang terjadi pascapembentukannya.

Pendekatan yang digunakan untuk melihat transformasi atau perubahan yang terjadi adalah *Historical Sociology*, pendekatan ini bertujuan melihat berbagai sejarah Islam Gorontalo yang di mulai dari masa kerajaan, hingga transformasinya pada saat Gorontalo menjadi provinsi dan melepaskan diri dari dominasi Sulawesi Utara, hal yang penting adalah transformasi terjadi pada struktur kekuasaan dan kultur Islam yang kental makin memperlihatkan keragamannya. Data yang diperoleh melalui *dept Interview*.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa : pertama : transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo dalam tataran struktural membuat lemahnya fungsi adat sebagai sumber identitas Gorontalo yang terbangun sejak jaman kerajaan, hal ini membuat konflik-konflik antar *Tauwa* (Pemimpin) di Gorontalo sangat lumrah terjadi, kedua : struktur adat Gorontalo yang tidak digunakan sebagai lembaga penilai atau rekrutmen kepala daerah ataupun struktur pemimpin di Gorontalo, Ketiga : pascapembentukan provinsi, oligarki partai kini menggerogoti sistem politik, hal ini sontak mendegradasi politik Islam yang terbangun sebagai dasar nilai moral para elit, keempat, kelas menengah stagnan tidak selalu repesif pada saat Gorontalo diperjuangkan menjadi provinsi di tahun 2000 silam, sedangkan dalam tataran kultural, yang pertama : kebijakan pemerintah yang berbau Islami makin marak dilakukan, sehingga membuat Gorontalo semakin kokoh dengan jargon serambi Madinah, walaupun tingkat keimanan masyarakatnya belum bisa di ukur, kedua : pascapembentukannya sebagai provinsi gerakan dakwah baru seperti Jama'ah Tabliq, Wahdah, HTI, dan LDK, mulai masuk di tengah-tengah masyarakat, yang makin memperkaya keberagaman Islam di Gorontalo.

Rekomendasi penelitian ini adalah : secara struktural diperlukan penguatan dewan dan lembaga adat, hal ini akan mengembalikan marwah Gorontalo sebagai daerah adat. Secara substansi adat akan memainkan wacana tentang pemimpin yang selalu menjaga lisan dan perbuatannya untuk Gorontalo, kemudian penguatan ini akan membuat partai tidak seenaknya melakukan polarisasi oligarki yang hanya mementingkan kehendak kelompoknya. yang kedua : secara kultural, gerakan dakwah baru yang kini masuk di Gorontalo secara kasat mata memang dapat membawa khasanah perbedaan ber Islam, tetapi perlu proteksi serius dari majelis ulama, dewan, lembaga adat dan otoritas pemerintah agar mampu menangkal gerakan dakwah yang berpotensi mengajarkan ajaran yang tidka sesuai dengan toleransi dan pluralisme di Gorontalo.

Kata Kunci : Transformasi, Politik Identitas, Gorontalo.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sín	S	Es
ش	Syín	Sy	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dád	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tá	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Zá	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	Ain	--	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك			Ka

ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
هـ	Ha	H	Apostrof
ء	Hamzah	-	Ye
ي	Ya	Y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah ($\overset{/}{_}$) ditulis a, *Kasrah* (- -) ditulis i, dan *Dammah* ($\overset{^}{_}$) ditulis u.

Contoh : أَحْمَدَ ditulis *ahmada*.

رَفِيقَ ditulis *rafiqa*.

صَلُّحَ ditulis *saluha*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis á, bunyi i panjang ditulis í dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis á(garis di atas)

فَالَا ditulis *falá*

2. Kasrah + Ya mati ditulis í(garis di atas)

مِيثاق ditulis *mísáq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis û

أصول ditulis *usûl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wawu mati ditulis au

قول ditulis *qaul*

F. Ta Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis h :

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *nimatulláh*

زكاة الفطر ditulis *zakátul-fitri*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إن ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *watun*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabâ îb*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *takhuzûna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah*, huruf l diganti dengan huruf *syamsiyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisa*.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan yang berlaku di sana seperti: *Kazi (qadi)*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang maha kuasa, berkat hidayahnya Tesis dengan Judul “ Transformasi Identitas Islam Pascapembentuka Provinsi Gorontalo” ini berhasil terselesaikan dengan baik, Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad saw, yang sepanjang jaman ajarannya mampu membuat umat manusia hidup secara berdampingan dalam bingkai yang rahmatan lil alamin.

Tentunya saya menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak lepas dari kritikan, masukan serta bantuan yang tak terhingga dari berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, Olehnya pada kesempatan ini saya perlu mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak, terutama kepada ;

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof.Drs.KH.Yudian Wahyudi. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr.H.Agus Moh.Najib,M.Ag.
3. Pembimbing dalam penyusunan tesis ini, bapak Dr. Ahmad Yani Anshori,M.Ag, dan Prof.Dr. H. Kamsi.M.A, yang dengan sabar dan ikhlas mengarahkan penulis agar tesis ini bisa segera terselesaikan dengan baik.
4. Penguji dalam tesis ini bapak Dr. Ocktoberrinsyah,M.Ag, dan bapak Dr.H.M.Nur,M.Ag. terima kasih telah memberikan masukan dan kritikan terkait penulisan tesis ini agar lebih dapat disempurnakan.
5. Staff Dosen dan pegawai di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, Mama (Zubaeda Muhammad), Papa (Asmanu Djaya Saputra) yang rela menunda keinginan dan cita-citanya hanya demi kelancaran studi ini. Maturnuwun, semoga curahan kasih,doa dan cinta kalian akan terus membawa saya dalam keselamatan dunia dan akhirat kelak. Aminn.
7. Kepada kanda Dr. Duke Arie Widagdo.,SH.MH, dan Ibu Popy Kadir,SE.,MM.Par. terima kasih atas suport dan masukan-masukan

berharga, yang tidak hanya pada kelancaran studi ini , tetapi lebih pada pesan moral yang saya selalu patuhi sampai hari ini.

8. Bang Norpin Ahmad,S.IP dan kanda Syarif Lamanasa,SH.MH, selaku Senior dan keluarga, yang mengajarkan saya pola hidup yang selalu tenang dan sabar dalam bertindak.
9. Kanda Funco Tanipu,ST.MA, Thariq Modanggu,S.Pd.i,M.Pd.i, dan Susanto Polamolo,SH.MH , sesepuh dan Intelektual Gorontalo yang sampai hari ini terus membuat terobosan pemikiran-pemikiran brilian tentang kemajuan Gorontalo, saya sangat bersyukur selalu dibimbing oleh senior-senior sekaliber kalian.
10. Kepada teman-teman Serikat Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Gorontalo (SMPIG), Donald Tunggkagi, Zulfianto Biahimo, Chandra Panto, Rahmat Santoso Gobel, Supandi Rahman, Farizka Humolungo, Anggraeni Mega, Man Muhammad, Asral Kelvin, Sahrain Bumulo, Rajik Luneto, Uchen Aldjufri, Afnita Dasinsingon, Anisa Alamri, Victris, Fidyan Mahani, Imam Nurhakim, Anastasya Sarjono, Fira Bachmid, Meyrin Panigoro, ka, Novaliansyah Abdussamad, Ardy Wiranata Arsyad, Ramly Bagi, Thomas, Vivi Rauf dan Jefri Piyoke. Cercahan semangat intelektual kalian selalu membuat saya terinspirasi.
11. Kepada teman-teman se asrama 23 Januari Gorontalo, Wonocatur Residence Yogyakarta, Lee, Fadli, Anjar,Upik, Alan, Kus-kus, Uten, Papu, Wa, Mumul, Kipu, Adi, Mamu, Tio, Halid, terima kasih selama di Asrama kalian keluarga terdekat yang selalu menjadi tempat curhat, keluh kesal saya selama di rantau. Kalian orang-orang hebat.
12. Kepada para narasumber penelitian ini yang telah meluangkan waktunya pada saya, pak Dr.Basri Amin, Dr. Sastro Wantu, Funco Tanipu.MA, Thariq Modanggu, KH.Gofir Nawawi, Ust.Abubakar Abdurahman Bachmid, Drs.Kariem Pateda.MM, Drs. Rustam Tilome, Mustari Sumaga, Ali Mobiliu, Sjafrudin Adam,M.Si, El nino Mohi.M.Si dan om Reyner Oeintu, terima kasih atas waktu dan kesediaannya.

13. Teman-teman seangkatan Prodi Studi Politik dan Pemerintahan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 , Mas Ainun Najib, Ifansyah Putra, Fahmi Kaunain, Ismail Al-Jihadi, Mita sari, Anisa Mina, Khusnul Khotimah, Fajar Arum Khasanah, Ibnu Murtadoh, Miski Almunawar, Ahmad Danudji, Budi Ayani, Rizki Pradana Hidayatullah, Nilman Ghofur, Firdaus. Terima kasih atas pengalaman intelektual kalian yang senantiasa dibagi bersama saya.
14. Teman diskusi dari Kota Manado dan Ternate , Bung Almunauwar Bin Rusli, Adlan Ryan Habibie, Irwan Ledang, Hidayat Yusuf.
15. Kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo (YLBHIG) bang Sarif Poneta, Rongki Ali Gobel, Apit rain, Rofan Vanderwais,Said Payu, Fransisco Manahapi, Ingrid Bawias, Dinah Soeparto, Eryanto Kadir, Sumantri Hulawa,Andi Umar, Djibran Male, Fadli Bukoting, Warsito Kasim, Gilang dirga.
16. Teman-teman Paguyuban Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
17. Keluarga besar yang selama ini mendukung secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta, 23 Februari 2017

Penyusun,

Eka Putra B Muhammad Santoso,SE.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II GEOGRAFIS DAN SEJARAH KULTUR ISLAM DI GORONTALO

A. Letak Geografis Gorontalo.....	23
1. Asal-usul Nama Gorontalo.....	23
2. Penduduk dan Dinamikanya.....	24
B. Islam di Masa Pra Kolonial.....	31
1. Masuknya Islam di Gorontalo; Pra Kolonial.....	33
2. Islam di Masa Raja Matodulakiki dan Eyato.....	36

BAB III PEREKAT ISLAM DI GORONTALO, DARI 23 JANUARI 1942 SAMPAI PEMBENTUKAN PROVINSI GORONTALO

A. Perekat Identitas Islam.....	40
1. Peristiwa 23 Januari 1942.....	40
2. Pembentukan Provinsi Gorontalo.....	43
3. Faktor Penting Pembentukan Provinsi.....	50

B. Islam Sebagai Dasar Perjuangan.....	53
1. Mobilisasi Islam dalam Politik di era Kolonial Gorontalo.....	54
2. Islamisasi dan Nasionalisme Lokal; Penerapan Politik Islam di Gorontalo.....	57

**BAB IV IDENTITAS ISLAM PASCAPEMBENTUKAN PROVINSI
GORONTALO**

A. Transformasi Politik Identitas Islam di Gorontalo.....	62
1. Lemahnya Fungsi Adat.....	65
2. Struktur Adat di Gorontalo.....	73
3. Elit Lokal dan Oligarki Partai.....	75
4. Stagnasi Kelas Menengah.....	77
B. Bangunan Identitas Islam Kultural.....	82
1. Kebijakan Islami Pemerintah.....	84
2. Ruang Dakwah Baru.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	91
B. Rekomendasi.....	92

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1 Letak Geografis dan luas Wilayah Gorontalo.....	25
B. Tabel 2 Daftar Gubernur Sulawesi Utara periode 1961-2015.....	52
C. Tabel 3 Index Pembangunan Manusia Gorontalo.....	80

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar Bagan Teori Politik Identitas	18
---	----

DAFTAR SINGKATAN

Amatora	: Aliansi Masyarakat Tomini Raya
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BOHUSAMI	: Bolaang Mongondow, Hulondhalo, Sanger Talaud, Minahasa
BKPRMI	: Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPD RI	: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DRASTIS	: Damai, Rasional, Sejuk, Etis
Debdagri	: Departemen Dalam Negeri
Forsmatora	: Forum Silaturahmi Masyarakat Tomini Raya
Forbes DLB	: Forum dua lima pohala'a
HPMIG	: Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HTI	: Hizbuz Tahrir Indonesia
HOS	: Hadji Oemar Said
IKIP	: Institut Keguruan dan ilmu pendidikan
IPB	: Ikatan Pengemudi Bentor
IPBK	: Index Pembangunan Berwawasan Kependudukan
IPM	: Index Pembangunan Manusia
KP3GTR	: Komite Pusat Pembentukan Provinsi Gorontalo-Tomini Raya
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Kapolda	: Kepala Polisi Daerah
Komjen	: Komisaris Jendral

Kabareskrim	: Kepala Badan Reserse Kriminal
LDK	: Lembaga Dakwah Kampus
Mubes	: Musyawarah Besar
Mendagri	:Mentri Dalam Negeri
Menkopolkam	: Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan
Mabes Polri	: Markas Besar Polisi Republik Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdatul Ulama
NIT	: Negara Indonesia Timur
NZG	: Nederlandsch Zendeling Genootschap
Persis	: Persatuan Islam
PTI	: Persatuan Tarbiyah Islam
PII	: Partai Islam Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
Presnas	: Presidium Nasional
Polda	: Polisi Daerah
PPIB	: Putra putri Islam Berprestasi
PI	: Perhimpunan Indonesia
P4GTR	: Panitia persiapan pembentukan Provinsi Gorontalo
RRI	: Radio Republik Indonesia
RI	: Republik Indonesia
SNCC	: Student Nonviolent Coordinating Commite
STM	: Sekolah Tehnik Menengah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
Sulut	: Sulawesi Utara
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDI	: Sarekat Dagang Islam
SI	: Sarekat Islam

UU : Undang-Undang

VOC : *Vereenigde Oostindische Compagnie*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menyelami sejarah kemerdekaan Indonesia sama halnya mengingat atau merekonstruksi memori kolektif tentang historiografi perjuangan segenap bangsa dari bentuk kolonialisme. Hal ini kemudian menjadi spirit yang mengakar pasca kemerdekaan Indonesia. Selain ikut terus membela Indonesia, dilain pihak spirit itu menggiring beberapa pola pemikiran ideologis yang saling silang untuk diperjuangkan.

Secara historis, pembentukan Indonesia sebagai bangsa baru terjadi pada tahun 1920-an, dilakukan melalui kegiatan intensif PI (Perhimpunan Indonesia) di negeri Belanda, kemudian dikukuhkan oleh sumpah pemuda 1928¹. Selanjutnya dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, sebuah negara baru yang bernama Indonesia muncul ke atas peta dunia².

Dalam hal ini refleksi Indonesia sebagai sebuah Negara telah dimulai. Tentu permasalahan kedepan tidak akan berhenti pada masa penjajahan kolonialisme, tetapi Indonesia akan dihadapkan pada 17.000 pulau, etnisitas, sub-kultur, dan ratusan bahasa lokal. Di Papua saja misalnya, tidak kurang dari 252 suku dengan bahasa daerahnya masing-masing³.

¹ Syafi'i Ma'arif, "*Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*" dalam Ali Fauzi dan Rizal (peny.), (Jakarta Selatan: Paramadina, 2010), hlm 18.

² *Ibid.*, hlm 19.

³ *Ibid.*,

Dari negara sebesar ini pekerjaan bangsa akan makin kompleks kedepannya, tentu dilihat dari berbagai sudut pandang, baik itu bidang sosial, politik, hukum ekonomi maupun budaya.

Terbukti pascakemerdekaan terlihat jelas bangsa Indonesia disibukkan dengan beberapa perlawanan-perlawanan yang bersifat aktif. Pergumulan beberapa ideologi besar dunia yang mempengaruhi pemikiran anak bangsa menjadi sebuah embrio yang sulit untuk ditahan, hingga runtuh pada saat orde baru mengambil alih kekuasaan. Tidak sampai disitu, orde baru yang sangat otoriter mampu membuat identitas atas nama ideologi bergeser pada gerakan kolektif seluruh masyarakat menuntut demokratisasi. Tak pelak tuntutan demokratisasi ini menuju pada jurang liberalisasi yang ekstrim. Munculnya beberapa kelompok yang menggunakan jubah agama dan etnis memegang peranan dengan tujuannya masing-masing atas nama kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Fakta ini menandakan bahwa politik identitas sangat mempengaruhi stabilitas negara. Tentunya, fenomena ini bisa dimaklumi, mengingat banyaknya pulau dan etnis menjadi hal ihwal pembentukan identitas yang kini marak menjadi bumbu dinamika politik Indonesia. Menurut Esposito dan John O Voll, gerakan pemberdayaan dan identitas meliputi partisipasi rakyat dan mengentalnya identitas-identitas komunal. Fenomena tersebut saling berkaitan, dan ini menunjukkan adanya upaya individu dan kelompok untuk melakukan kontrol atas

berbagai perkembangan dan lembaga, yang nampaknya begitu besar hingga dapat dikontrol lagi⁴.

Apa yang dibahasakan oleh Esposito sangat mengena dengan realitas politik di Indonesia era reformasi. Adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjawab keresahan antara banyaknya ketimpangan yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru. Akibat desentralisasi ini kemudian melahirkan beberapa pemekaran daerah. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2007, telah dilakukan pemekaran Provinsi sebanyak 7 provinsi, yaitu ; Maluku Utara, Banten, Kepulauan Bangka-Belitung, Gorontalo, Irian Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Pemekaran kabupaten sejak 1991 hingga 2004 adalah sebagai berikut ; Nangroe Aceh Darussalam 11 Kabupaten, Sumut 8 Kabupaten, Jambi 7 Kabupaten, Riau 6 Kabupaten, Sumbar 5 Kabupaten, Bengkulu 5 Kabupaten, Sumatera Selatan 7 Kabupaten, Lampung 6 Kabupaten, Bangka Belitung 4 Kabupaten, Riau 5 Kabupaten, Jakarta 1 Kabupaten Kepulauan Seribu, Banten 2 Kabupaten, Jabar 5 Kabupaten, Jatim 1 Kabupaten, NTB 3 Kabupaten, NTT 4 Kabupaten , Kalbar 5 Kabupaten, Kalteng 8 Kabupaten, Kalsel 3 Kabupaten, Kaltim 7 Kabupaten, Sulawesi Utara 6 Kabupaten, Gorontalo 3 Kabupaten, Sulteng 7 Kabupaten, Sulsel 3 Kabupaten , Sulawesi Barat 2 Kabupaten, Sulawesi Tenggara 6 Kabupaten, Maluku 5 Kabupaten, Maluku Utara 7 Kabupaten, Irian Jaya Barat 6 Kabupaten⁵.

⁴Esposito dan John Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*,(Bandung: PT Mizan, 1999), hlm. 13.

⁵Idris Rahim, *Identitas Etno-Religius dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo*, Disertasi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010, hlm 3

Banyaknya Provinsi dan Kabupaten/Kota memekarkan diri pasca orde baru adalah sebuah euforia dari masyarakat yang selama 32 tahun hidup dalam belenggu pemerintahan yang sentralistik. Semenjak berlakunya UU pemerintahan daerah yang akhirnya berubah menjadi UU No. 32 2004 dan UU No 23 2014, tentang pemerintahan daerah, pada pasal 10 jelas menegaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah⁶, secara substansial pemerintah pusat hanya mengurus urusan moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan, dan agama. Melihat peraturan UU ini tegas mewajibkan pemerintah daerah untuk seoptimal mungkin untuk membuat daerahnya berkembang dan maju.

Pada tingkatan lokal khususnya Gorontalo, pemekaran diumumkan pada tanggal 22 Desember tahun 2000 melalui UU No 38 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi. Keputusan ini resmi memisahkan Gorontalo dengan Sulawesi Utara induk provinsi sebelumnya, dan menjadikan Gorontalo provinsi ke 32. Beberapa hal kursorial yang menyebabkan Gorontalo memisahkan diri, telah dibahas dalam disertasinya Idris Rahim yang berjudul Identitas Etno Religius dalam pembentukan provinsi Gorontalo. faktor tersebut adalah masalah identitas religiusitas yang cukup membedakannya dengan provinsi Sulawesi Utara, bahkan hal ini menjadi memori kolektif masyarakat Gorontalo yang tertanam dan terpatri secara adat dan kebudayaan.

⁶ Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet.ke-9 (Jakarta: PT Rajawali Press,2014), hlm 363

Beberapa memori tersebut disampaikan oleh Basri Amin, antara lain adalah perjanjian *Uduluwo Limo Lo Pohala'a*. Konsensus lokal yang disertai dengan basis nilai lokal; *Adati Hulo-huloa to syara'a* (Adat yang menundukkan pada syahri'ah) , *Syara'a hulo-huloa to quruani* (Syahri'ah yang berdasarkan pada Al-Qur'an)⁷. Hal ini adalah awal dari sebuah konsensus peradaban yang mampu meleraikan pertikaian antara kerajaan Limboto dan Gorontalo yang berlangsung selama 200 tahun. Kemudian peristiwa 23 Januari 1942, dimana penggalangan semangat identitas Gorontalo menyatu dalam hal mengusir penjajah Belanda saat itu, fenomena ini kemudian menjadi semacam memori ingatan ke dua yang mampu mengembalikan kekuatan umat demi sebuah kemerdekaan, ketiga adalah, pembentukan provinsi Gorontalo itu sendiri yang didasari pada perbedaan etno religius dengan provinsi Sulawesi Utara⁸.

Semua refleksi tentang gerakan tersebut menjadi basis Islam yang mengakar sebagai identitas kolektif masyarakat Gorontalo. Perjalanan dan pertemuan antara Islam sebagai agama yang datang dan lokalitas Gorontalo memiliki gelombangnya sendiri yang tidak mudah di tuliskan secara textual, dari sinilah periodisasi peristiwa, pola-pola kesadaran hidup, perkembangan bahasa, struktur masyarakat teritori, dan reproduksi ritual lokal menjadi sebuah tuntunan untuk dikaji dan di pahami.

Seiring dengan berjalannya waktu, Provinsi Gorontalo telah memasuki usia ke 16, berbagai konsensus pun kembali berkecamuk, khususnya tentang

⁷ Amin Basri, *Memori Gorontalo*, (Yogyakarta : Ombak, 2012,) cet. ke-1 hlm. 11.

⁸ *Ibid.*

masalah ke identitas yang telah terbentuk. Islam yang menjadi agama mayoritas, dan tertanam rapi dibenak setiap rakyat Gorontalo secara struktural digunakan oleh elit politiknya untuk mendapatkan kursi kekuasaan. Eksklusifitas Islam secara struktural menurut peneliti adalah sebuah respon atas kulturasi Gorontalo akan sebuah pemimpin yang harus berlatar belakang seorang yang beragama Islam, secara umum Gorontalo adalah daerah yang cair akan keberagaman etnis tetapi tidak dengan agama. Sepanjang perjalanan Gorontalo menjadi provinsi tidak ada satupun yang bukan beragama Islam menjadi kepala daerah, tetapi yang bukan etnis Gorontalo sudah ada. Bahkan bukan hanya di tingkatan Gubernur, tetapi juga pada posisi kepala daerah tingkat II dan anggota legislatif.

Dalam kondisi ini terjadi transformasi yang cukup ekstrim dalam energi identitas Islam Gorontalo. Respon kulturasi digunakan oleh elit semakin mendegradasikan nilai Islam dalam dinamika politik di provinsi Gorontalo. Keeksotisan daerah adat yang terkontaminasi dengan Islam nampak tidak berperan secara aktif seperti penjelasan memori kolektif sejarah, bahkan luntur dengan sebuah polarisasi oligarki partai.

Terbukti dengan beberapa fenomena pasca Gorontalo menjadi provinsi, konflik-konflik sesama elit⁹ menjadi semacam hal yang sangat biasa terlihat, bahkan membuat nilai kedewasaan berpolitik makin terdegradasi¹⁰. Islam dalam

⁹ Degorontalo.co/dituding-memperkaya-diri-rusli-akan-lapor-adhnan-ke-polisi/, diakses pada kamis 15 Desember 2016.

¹⁰ Antara News. Warga Minta persetujuan Walikota dan Gubernur dihentikan. Dalam www.antarasulsel.com/berita/657/warga-minta-persetujuan-walikota-dan-gubernur-dihentikan, di akses pada kamis 15 Desember 2016.

bentuk identitas tidak mampu menemukan jalan keluarnya seperti halnya pada pembentukan ataupun pada peristiwa-peristiwa sejarah terdahulu. Islam dalam hal ini dijadikan dominasi peraih simpati, atau batu pijakan untuk mendapatkan sebuah legitimasi kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang ujungnya tidak akan berafiliasi secara optimal.

Represi ini memang mencuat tajam dalam skala eksistensi dari elit Gorontalo dalam memproklamirkan identitas Islam dalam rangka gerakan politiknya, oleh karena selama bernaung dengan Provinsi Sulawesi Utara elit-elit Gorontalo ada dalam bayang-bayang elit Sulawesi Utara yang mendominasi peranannya.

Hal ini kemudian menjadi sebuah euforia yang terlalu berlebihan, sehingga menciptakan kekuatan etnisitas yang cukup kompleks. Setelah itu pemicu sejarah, aristokrat feodal di Gorontalo yang mengalami keemasan pada masa kolonial mempunyai peranan yang signifikan dalam pemerintahan daerah¹¹.

Meskipun di Gorontalo para kaum aristokrat feodal sudah tidak ada, tetapi masih ada simbol-simbol dengan menggunakan marga sebagai keturunan Raja Gorontalo digunakan untuk mendapatkan sumber-sumber kekuasaan politik¹². Meminjam istilah Migdal (1988) fenomena ini disebut sebagai “Orang kuat lokal”

¹¹Sastro Wantu “*Dinamika Elit Politik Lokal Gorontalo*” dalam Ramli dan Norpin (ed.), *Transformasi Demokrasi Lokal Gorontalo*, (Gorontalo : PT Pustaka Indonesia Press dan Fisip Unisan: ,2012),cet. ke-1, hlm 114.

¹²*Ibid.*, hlm. 115.

yang eksis semenjak pembentukan provinsi Gorontalo, dan mampu mengontrol kelompok-kelompok sosial masyarakat¹³.

Hal ini menurut pengamatan saya secara umum menciptakan sebuah fenomena *patron* dan *client* antara elit dan masyarakat. Elit yang notabennya selalu menggunakan marga dan identitas Islam akan membuat kekuatan pengawasan terhadap kinerja elit timpang, bahkan fenomena ini stagnan membuat kelas menengah Gorontalo terhenti dalam tataran yang normatif. Representasi ini yang kemudian menjadi sebuah hal yang perlu di tindak lanjuti lebih lanjut.

Beberapa hal ini terlihat secara jelas dalam refleksi transformasi identitas Islam di Gorontalo. Secara garis besar bahwa politik di Gorontalo pasca pembentukannya lebih dominan dari pada nilai Islam yang tertanam dan menjadi semacam pisau sejarah yang menentukan Gorontalo sebagai sebuah provinsi.

Dalam tataran kultural masyarakat, resensi sebuah Identitas Islam telah hadir jauh dari jaman kejayaan kerajaan di Gorontalo, dalam refleksi ini dia integral dengan kontestasi politik pada saat itu yang melahirkan *adat bersendikan syara'a*, *syara'a bersendikan kitabullah*, melihat ini setelah pembentukan provinsi Gorontalo, bangunan identitas Islam nampaknya tidak berhenti pada tataran adat, tetapi telah dimasuki oleh gerakan dakwah baru seperti Jama'ah Tabliq, Wahdah Islamiah, dan dikalangan kampus ada organisasi Islam seperti HTI, LDK. Fenomena ini banyak mempengaruhi secara signifikan identitas lama yang ada dan mengakar di Gorontalo.

¹³ *Ibid.*,

Melihat penjelasan diatas saya sebagai peneliti ingin melihat secara mendalam ke identitas islam secara struktural politik lokal dan kulturasi budaya masyarakat yang terangkum dalam “*Transformasi Identitas Islam Pascapembentukan Provinsi Gorontalo*”.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas , penelitian ini untuk melihat transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo, tentunya akan membaginya dalam kondisi struktur politik yang terpengaruh pada identitas Islam serta kultur masyarakat Gorontalo tentang identitas Islam. Secara garis besar dirumuskan sebagai berikut ;

1. Mengapa terjadi transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo?
2. Bangunan identitas Islam seperti apa yang terbangun pascapembentukan provinsi Gorontalo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka beberapa tujuan yang bisa di tuliskan untuk penelitian ini, sebagai berikut ;

1. Tujuan;
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengapa terjadi transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo.

- b. Untuk melihat bangunan Identitas Islam yang terjadi pasca pembentukan provinsi Gorontalo.
2. Kegunaan;
 - a. Hasil penelitian secara praktis, di harapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk seluruh lapisan masyarakat Gorontalo.
 - b. Hasil penelitian secara akademis, di harapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna bagi acuan civitas akademika dan rujukan peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya tentang identitas Islam di Gorontalo.

D. Kajian Pustaka

Lebih spesifikasi penelitian ini mengambil beberapa telaah pustaka sebagai rujukan, karena penelitian ini berhubungan dengan identitas Islam pasca pembentukan provinsi. Peneliti yang pertama merujuk pada Disertasi Idris Rahim, dengan judul Identitas Etno Religius dalam pembentukan provinsi Gorontalo. Disertasi yang dipertahankan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 ini, membahas tentang identitas nilai keagamaan khususnya Islam dalam pembentukan Provinsi Gorontalo. Hal-hal yang dibahas selain Identitas Etno religius masyarakat Gorontalo, secara spesifikasi Disertasi ini juga membahas tentang akar identitas kultural Gorontalo, penguatan politik identitas hingga ekspresi politik identitas melalui pemekaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis dan menggunakan teori politik identitas dan gerakan sosial, dua teori ini digunakan karena beranjak pada realitas identitas politik masyarakat Gorontalo yang ingin memisahkan diri dari provinsi Sulawesi Utara

dan gerakan yang memicu percepatan pembentukan Provinsi Gorontalo. Olehnya disertasi menjadi sebuah pijakan dari penelitian ini karena peneliti menganggap bahwa, apa yang di bahasakan dalam disertasi ini akan berkembang dari segi struktur elit Gorontalo yang berkelindan dengan identitas Islam, serta kultur masyarakat yang masih mempertahankan kemurnian Islam sebagai landasan falsafah hidup dan interaksi antara keduanya¹⁴.

Yang kedua adalah buku dengan judul “Memori Gorontalo” karya Basri Amin, buku tersebut membahas tentang teritori, transisi dan tradisi. Lebih spesifik lagi buku Memori Gorontalo terbitan Ombak tahun 2012 ini, meninjau teritorial wilayah Gorontalo yang dibahas jauh pada masa kolonial hingga reformasi. Amin juga membahas tentang beberapa tokoh Gorontalo yang sangat berperan baik skala lokal maupun nasional, diantaranya (alm) Aloe Saboe yang menjadi Profesor di Universitas Padjajaran Bandung dan ikut menjadi pelopor berdirinya Fakultas Kedokteran disana, kemudian (alm) S.R. Nur, Profesor Hukum Adat Universitas Hasanudin yang berhasil membuat Disertasi tentang hukum tata negara Kerajaan Gorontalo¹⁵.

Berikutnya adalah buku berjudul “ Transformasi Demokrasi Lokal Gorontalo” buku yang tersaji karena terlaksananya seminar yang membahas kondisi politik dan kultur masyarakat di Gorontalo pada tahun 2012. Dalam buku tersebut menampilkan makalah-makalah yang berkualitas dari para akademisi dan praktisi Gorontalo, dalam buku ini peneliti melihat secara spesifik makalah dari

¹⁴Idris Rahim, *Identitas Etno-Religius dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo*, hlm.13.

¹⁵Amin, *Memori Gorontalo*, hlm .66.

Dr. Sastro Wantu. yang membahas tentang “Dinamika Elit Politik Gorontalo” dalam pembahasan Sastro Wantu, mengatakan bahwa pascapembentukan provinsi Gorontalo, raja-raja kecil yang merupakan elit notabennya memiliki marga yang sama dengan historisitas Gorontalo menciptakan sebuah situasi yang mampu mengontrol kelompok-kelompok sosial. Dalam makalah ini juga di kategorikan klasifikasi elit gorontalo yang terdiri dari akademisi, pengusaha dan birokrasi yang menjadi sentral dalam pertarungan-pertarungan mendapatkan kekuasaan. Selain itu makalah yang menjadi sebuah pembahasan tentang identitas adalah tulisan Basri Amin dengan judul “demokratisasi, *Civil Society* dan identitas lokal,” dalam pembahasannya Basri Amin membahasakan bahwa tantangan identitas lokal pascapembentukan adalah dengan penglihatan dinamis, tantangan nilai ideal demokrasi dan kapasitas masyarakat Gorontalo¹⁶.

Penelitian tentang identitas Gorontalo juga dilakukan oleh Paris Jusuf dalam tesisnya di Universitas Gadjah Mada dengan judul “Pembentukan Provinsi Gorontalo dan dampaknya terhadap Ketahanan Wilayah’ tahun 2000. Dalam tesisnya tersebut Paris mengatakan bahwa aspek integrasi sangat penting untuk dijadikan instrumen dalam hal pemekaran. Oleh karena dalam penulisan tesis tersebut banyaknya konflik horizontal pada saat pemekaran sementara berlangsung¹⁷.

Kemudian Buku dari Jogja untuk Gorontalo yang diterbitkan oleh HPMIG Press di tahun 2009 juga membahas tentang sekelumit identitas Gorontalo, tulisan

¹⁶Sastro Wantu, “*Dinamika Elit Politik Lokal Gorontalo*” hlm.120,

¹⁷Paris Yusuf, *Pembentukan Provinsi Gorontalo dan Dampaknya terhadap ketahanan wilayah*, Tesis, Ilmu Ketahanan Nasional UGM, Yogyakarta, 2000.hlm 3.

Funco Tanipu yang membedah tentang konstruksi identitas bangsa Gorontalo membahas tentang sejarah adat yang di bingkai dengan Islam di Gorontalo. Hal lain juga adalah pembagian etnis Sulawesi Utara pada hasil evaluasi 2006 oleh BPS. Selain itu berbagai Dinamika pembentukan provinsi Gorontalo di bahas secara lugas oleh Funco Tanipu¹⁸.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti memfokuskan variabel dalam transformasi identitas Islam yang di maksud, akan bermuara pada politik identitas yang mencoba mengelaborasi struktur dan kultur identitas Islam Gorontalo;

1. Teori Politik Identitas.

Identitas merupakan sebuah jati diri yang tidak bisa dilepaskan dalam fenomena sosial, sejak beratus-ratus abad lamanya identitas menjadi semacam ruh dalam diri setiap manusia. Olehnya kemudian identitas yang dilambangkan atas nama, suku, pekerjaan maupun agama, menjadi hal ihwal yang bisa membawa manfaat juga sebaliknya bisa berpotensi konflik.

Di negara-negara yang multi etnik, seperti Indonesia, India, dan negara pecahan Soviet pernah merasakan pahitnya identitas yang harus banyak menelan korban dikarenakan tidak dikelola secara adil. Di benua Amerika pun demikian, ketertindasan suku Indian membuat konflik yang panjang hingga hal-hal rasis kerap terjadi di negeri paman sam tersebut.

¹⁸Funco Tanipu, "Konstruksi Identitas Bangsa Gorontalo", Dalam Funco,dkk(ed.), *Dari Jogja untuk Gorontalo*, cet.ke-1 , (Yogyakarta: HPMIG Press, 2009) , hlm 25.

Fenomena ini kemudian menjadi semacam studi tersendiri atas perkembangan ilmu sosial, identitas yang telah mengakar di dalam tubuh manusia bisa bermetamorfosis menjadi semacam gerakan modern yang lebih terstruktur. Hal ini dibahasakan oleh A.L Kauffman yang menjelaskan hakikat politik identitas dengan berpatokan pada gerakan mahasiswa anti kekerasan yang dikenal dengan SNCC (*the student Nonviolent Coordinating Commite*), sebuah organisasi gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat di awal 1960-an¹⁹.

“Secara substansi, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara²⁰”.

Dalam skala ini melihat efek politik identitas yang sangat kompleks, Esposito pernah mengadakan penelitian di Pakistan tentang fenomena politik identitas. Dalam hal ini Esposito melihat politik identitas harus menunda pembentukan konsitusi Pakistan selama sembilan tahun, dikarenakan pertempuran yang berkepanjangan antara kelompok tradisionalis konservatif dan kelompok modernis. Dalam hal ini elit Pakistan harus memutar otak lebih keras dengan potensi pemimpin politik yang mempunyai pendidikan dan orientasi barat dan pemimpin agama yang berpendidikan tradisional²¹.

Walaupun berhasil membuat konsitusi tahun 1956 dengan nama negara Republik Islam Pakistan, negara tersebut adalah negara demokrasi yang berdasarkan prinsip Islam. Dalam hal ini Esposito mengatakan bahwa identitas di

¹⁹Syafi'i Ma'arif “*Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*” , hlm. 4.

²⁰*Ibid.*

²¹Esposito, *Identitas Islam pada perubahan Sosial Politik*, cet. ke-1 (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986),. hlm .219.

Pakistan dan negara-negara timur tengah lainnya akan sangat kompleks , karna akan diperhadapkan pada kebanggaan masa lalu sukuisme yang mengakar²².

Di Indonesia sendiri jelas berbeda dengan fenomena yang ada di Pakistan, pergulatan identitas atas nama agama telah terjadi di awal-awal kemerdekaan Indonesia, mulai dari perdebatan konsitusi Indonesia sampai pada gerakan radikal Islam pasca orde baru yang notabennya adalah sebuah politik identitas yang terus di galakkan atas dakwah mendirikan syariat Islam. Melihat kompleksitas ini , Islam yang merupakan identitas kultural sebagian masyarakat, tidak selamanya menampakkan identitas yang radikal tetapi Islam lebih di gunakan pada jalur-jalur yang lebih konsitusional.

Jalur konsitusional identitas Islam ini di akomodir pemerintah dengan UU yang menjadi sebuah kado pasca orde baru. Di wilayah Sulawesi Utara, terdapat Provinsi baru yakni Gorontalo yang menampakkan identitas dengan pemekaran yang diperjuangkan segenap masyarakatnya, bahkan dalam perjalanannya mempunyai banyak dinamika secara struktur dan kultur identitas Islamnya. Yasraf Piliang mengatakan identitas sebagai jalan yang berliku atau tidak selalu bersifat final. *Stuart Hall* (1996:160) menyebutnya sebagai “suatu yang tidak pernah sempurna, selalu dalam proses dan selalu di bangun dari dalam.

Proses pembangunan dari dalam ini adalah sebuah eksistensi identitas yang sangat dinamis. Keragaman agama, etnis dan kebudayaan bisa memperngaruhi proses perubahan dari dalam tersebut. Tetapi kemudian hal yang semakin kompleks dari perubahan dari dalam adalah ingatan sejarah yang melekat erat

²²*Ibid.*

secara kultural. Hal ini selalu merambah dinamika identitas, apalagi ingatan itu meliputi aspek politik, atau ketimpangan ekonomi yang terjadi atas masa lalu.

Tarrow menyatakan identitas sebagai faktor yang menentukan secara struktural dan dinamis menuju gerakan rakyat. Tarrow menambahkan identitas kolektif menggerakkan dan menyimpulkan kekuatan untuk membingkai ideologi menuju kekuasaan publik atau politik²³.

Refleksi yang dibahasakan Tarrow lebih cocok dalam pembahasan sebuah daerah yang akan memekarkan diri, karena pola identitas kolektif akan sangat di butuhkan dalam rangka menekan kekuatan politik. Tentunya untuk dengan segera mengabdikan permintaan dari masyarakat di daerah dengan menggunakan identitas sebagai simbol kekuatan gerakan.

Pascapembentukan daerah pemekaran akan terlena dengan konflik-konflik internal yang mengatasnamakan identitas sebagai basis menuju kursi kekuasaan politik, Jean Baudrillard mengatakan efek Identitas mengalami dekonstruksi dari narasi awal originalitasnya²⁴. Dalam keadaan seperti ini Identitas tidak lagi bersifat kolektif tapi Individualistis yang kokoh. Hal ini tentunya menjadi permasalahan mendasar tentang nilai-nilai identitas yang diperjuangkan.

Olehnya Agnes Heller lebih spesifikasi menyatakan bahwa Politik Identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan (*difference*) sebagai suatu kategori politik yang utama. Setelah

²³ Idris Rahim, *Identitas Etno-Religijs dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo*, hlm. 20.

²⁴ Jean Baudrillard dalam Abdillah, *Politik Identitas Etnis , Pergulatan tanda tanpa Identitas*, cet. ke-1 (Magelang : Yayasan Indonesiatara,2000), hlm 16.

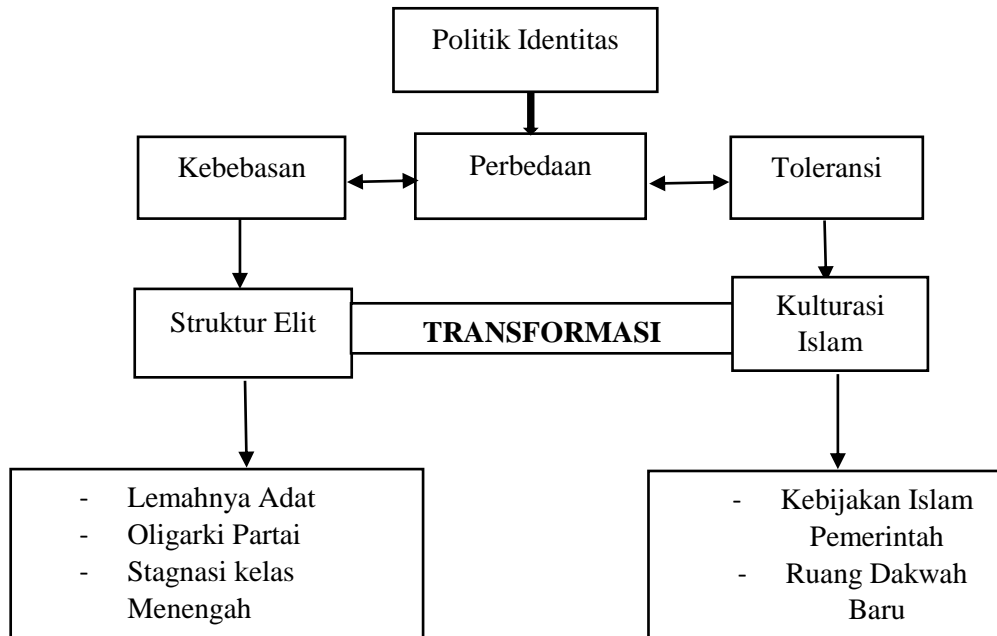
kegagalan narasi besar (*Grand narrative*), ide perbedaan, telah menjanjikan suatu kebebasan, serta toleransi²⁵.

Teori ini menurut Heller melatarbelakangi sebuah fenomena yang terjadi akibat perbedaan entitas politik yang mencolok dalam sebuah Negara bangsa (*Nation State*) representasi ruang kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan ide yang terbangun dalam bingkai identitas yang ada, dalam konstruksi ini kemudian, penerapan teori ini dalam fenomena yang ada pascapembentukan Provinsi Gorontalo bahwa, identitas yang terbangun adalah Islam sebagai basis religiusitas masyarakatnya sejak jaman 2 kerajaan besar di Gorontalo. Hal ini terus membuka ruang sejarah yang linier pada setiap masa di daerah ini, sampai dikokohkan dalam pementukannya sebagai daerah otonom. Narasi besar yang telah dicapai, kenyataan pascapembentukannya mengalami transformasi yang sangat memperlihatkan kebebasan ide dari konteks struktural dan toleransi di tataran kultural. Struktur melahirkan lemahnya adat, oligarki partai hingga stagnasi kelas menengah, sedangkan dalam tataran kulturasi melahirkan kebijakan yang berbau Islam oleh pemerintah serta ruang atau gerakan dakwah baru.

²⁵*Ibid.*, hlm. 22.

Teori Politik Identitas Agnes Heller

Gambar 2.1



F. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini fokus membahas tentang identitas Islam pasca pembentukan Provinsi Gorontalo. olehnya selama 16 tahun ini menjadi sebuah refleksi kritis peneliti melihat perkembangan struktur dan kultur identitas Islam di Provinsi Gorontalo.

Melihat fokus penelitian ini, langkah yang dikaji peneliti mulai dari provinsi Gorontalo terbentuk. Disitulah titik tekan identitas Islam mempunyai peran sentral yang luar biasa. identitas Islam pada saat itu menjadi landasan pembentukan daerah yang otonom, setelah itu Islam dijadikan identitas yang linier dalam memperoleh kekuasaan.

1. Pendekatan

Fokus penelitian ini dilaksanakan di provinsi Gorontalo, dengan menggunakan pendekatan *historical sociology*²⁶. Pendekatan ini berusaha untuk melihat secara komperhensif transformasi perjalanan sejarah dan identitas Islam di Gorontalo dengan landasan kultural masyarakat.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam menyelami data-data tentang penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara mendalam (*depth interview*)²⁷ pada beberapa elit politik dan pelaku sejarah yang terlibat secara aktif maupun pasif pada saat pembentukan provinsi Gorontalo, diantaranya yang menjadi panitia inti pembentukan provinsi Gorontalo, bapak Rustam Tilome selaku bendahara presidium Nasional pembentukan provinsi Gorontalo, Mustari Sumaga, perwakilan kelas menengah Gorontalo waktu pembentukan provinsi Gorontalo, Thariq Modanggu sebagai deklarator pembentukan Kabupaten Gorontalo utara, El-Nino Mohi Anggota DPR RI perwakilan Gorontalo, Sastro Wantu, Basri Amin, Funco Tanipu sebagai ilmuwan politik dan sosiolog Universitas Negeri Gorontalo, selain dalam tataran elit dan tokoh penting pembentukan provinsi Gorontalo beberapa tokoh agama dan budayawan juga akan peneliti datangi seperti ketua dewan adat provinsi Gorontalo, bapak Kariem Pateda, serta tokoh organisasi Islam NU, KH. Gofir Nawawi yang juga salah satu pimpinan pondok pesantren Salafiah, Safiiah Banuroja Kabupaten Pohuwato Gorontalo, ketua MUI provinsi, Ustadz.

²⁶Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet.ke-1, (Malang : UIN Maliki Press, 2008), hlm. 355.

²⁷*Ibid.*

Abrudarahman Abubakar Bachmid, dan tokoh Jama'ah Tabliq Gorontalo, Ustadz, Sjafrudin Adam, terakhir untuk budayawan peneliti mewawancarai Ali Mobiliu sebagai pemerhati budaya di Gorontalo. hal ini dilakukan peneliti untuk melihat secara kompleks tentang objek penelitian.

3. Tehnik analisis data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif, ini digunakan agar mempermudah pembentangan data yang berupa hasil wawancara, dokumen, serta kliping surat kabar online yang terkait dengan objek penelitian. Proses analisis ini lebih pada menyusun, mengkategorisasi, kemudian menyimpulkan maksud dari data tersebut.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun sebanyak 5 bab yang terdiri dari subbab di setiap bab, olehnya antara bab satu dengan lainnya mempunyai relasi yang saling berhubungan, maka konstruksi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo akan terlihat secara komperhensif.

Pada bab pertama, diawali dengan latar belakang yang akan membahas secara runut bagian-bagian penting dalam fenomena tentang identitas Islam dan transformasinya di Gorontalo, fokus permasalahannya ada pada dinamika secara historis yang sangat bersinggungan dengan konstalasi politik di Gorontalo, selanjutnya masih dalam bab pertama, ada subbab tentang rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi dan sistematika penulisan.

Pada bab ke dua nantinya, akan dibahas tentang geografis dan sejarah masuknya kultur Islam di Gorontalo yang akan dibagi atas dua subbab, yang pertama membahas letak geografis Gorontalo, subbab yang ke dua akan mengurai masuknya Islam pada masa pra-kolonial hingga peran dari Islam sendiri sebagai agama yang mampu membentuk identitas kultural bagi masyarakat Gorontalo. Bab ke tiga, membahas tentang fenomena 23 Januari dan sekelumit kisah pembentukan provinsi Gorontalo, yang pada sub babnya, yakni perekat Identitas Gorontalo dan Islam sebagai dasar perjuangan.

Sedangkan Bab empat akan membahas secara runut identitas Islam yang terjadi pascapembentukan provinsi Gorontalo, dalam bab ini akan di bagi sub bab transformasi identitas Islam di Gorontalo, kemudian bangunan identitas Islam kultural. Dan yang terakhir bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang mengambil fokus pada transformasi identitas Islam pascapembentukan provinsi Gorontalo ini membahas secara komprehensif tentang bagaimana Islam secara struktur dan kultur mampu menjadi tonggak perjuangan Gorontalo dari masa kolonialisme hingga saat ini. Namun keduanya telah mengalami beberapa perubahan yang krusial, olehnya beberapa kesimpulan yang dapat dituliskan;

Yang pertama, pascapembentukan provinsi Gorontalo, geliat perpolitikan struktur elit sangat represif, ini di akibatkan daerah baru yang di bangun membutuhkan sentuhan elit-elit lokal yang bebas dari intervensi dan campur tangan elit Sulawesi Utara. Gejala ini kemudian membawa fenomena yang bertolak belakang dengan semangat kolektifitas dalam membentuk Gorontalo sebagai Provinsi, oleh karena fenomena tersebut membuka ruang konflik yang cukup pelik bagi sesama elit yang ada di Gorontalo, agresi ini memang tidak dapat di pungkiri, tetapi kemudian jalan yang mungkin dilakukan adalah penguatan simpul-simpul kearifan lokal seperti dewan adat dan lembaga adat.

Preferensi politik yang cukup pelik ini tidak hanya disebabkan oleh struktur yang cenderung kaget, tetapi sistem oligarki partai yang mengakar membuat pragmatisme berpolitik terjadi, saling tuntutan, dan tingkah laku yang hanya akan membuat rakyat makin terkotak-kotak.

Apalagi pasca pembentukan provinsi Gorontalo kelas menengah yang dahulu getol memperjuangkan kebersamaan pembentukan Provinsi kehilangan daya kritisnya pada pemerintahan dengan berbagai kebijakan yang di terapkan dalam skala daerah, bahkan ada beberapa kelas menengah yang berusaha melegitimasi kebijakan yang nyata-nyata salah dan tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat yang masih ada di bawah garis kemiskinan.

Yang kedua, bangunan identitas kultural Gorontalo kini telah makin kaya akan banyaknya kebijakan pemerintah yang berbau agama, walaupun kemudian kadar substansi nilainya belum bisa di ukur. Hal ini secara kritis saya katakan hanya sebagai intrik politik agar mendapat legitimasi dalam menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan, karena tidak akan sinkron dengan tingkah laku elit yang sering menebar konflik yang tidak perlu didepan publik.

Ketiga adalah, di kalangan kelas menengah dan kultural Gorontalo muncul fenomena dakwah baru yang di prakarsai oleh jamaah tabliq, HTI,LDK, Wahdah, gerakan dakwah ini secara langsung memperkaya khasanah perbedaan berislam di Gorontalo, karena selama ini kita mengenal NU dan Muhaammadiyah yang mendominasi gerakan-gerakan dakwah, tetapi dengan adanya keterbukaan akses informasi dan sistem hari ini gerakan dakwah ini diterima di Gorontalo.

B. Rekomendasi

Dengan melihat hal-hal di atas , ada dua rekomendasi yang saya tawarkan, yakni yang pertama ; penguatan Adat di Gorontalo, hal ini implikasinya sangat luas, yakni membawa kembali marwah Gorontalo dalam daerah adat, kemudian

ini akan mempublikasikan seperti apa pemimpin yang pas dengan rakyat Gorontalo, tentunya dilihat dari bagaimana perjalanan kariernya.

Kemudian adat juga akan membuat sebuah aturan pelebaran konflik yang disebabkan elit-elit yang ada di Gorontalo, legitimasinya demi Gorontalo yang lebih baik akan membuat secercah perjuangan Gorontalo mulai dari jaman kerajaan akan terjaga dengan nilai-nilai kearifan lokal. Dalam konteks ini sistem oligarki partai tidak akan dengan seenaknya membuat sebuah polarisasi politik praktis ditingkatan lokal. Karena memang secara wacana publik steatmen Adat akan menjadi landasan filosofis masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya.

Yang kedua tentang fenomena gerakan dakwah baru di Gorontalo hari ini memang secara umum telah menyumbangkan sebuah khasanah pengetahuan islam bagi masyarakatnya, tetapi kemudian perlu proteksi dari adat, majelis ulama dan otoritas pemerintah agar dapat mecegah gerakan dakwah yang berpotensi mengajarkan paham-paham yang tidak sesuai dengan kultur gotong-royong dan pluralisme di Gorontalo.

Hal ini penting agar kemudian daerah yang terkenal hampir tidak pernah terjadi konflik antar agama tetap terjaga dengan kulturasi filter yang kuat dari masyarakat, sikap lugas dari pemerintah dan majelis ulama Indonesia Provinsi Gorontalo.

Semuanya akan menjadikan Gorontalo akan kembali pada marwah perjuangannya, karena islam sebagai *way of life* akan terfragmentasi dengan nilai-nilai perjuangan membuat daerah menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman Wahid “*Kelas Menengah Islam di Indonesia*”, dalam Richard dan Young (ed), *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta ; LP3ES,1993.
- Alim Niode, dan Elnino, *Abad Besar Gorontalo*, Gorontalo : Presnas Publishing ,2003.
- Amin Basri , *Memori Gorontalo*, Yogyakarta, Penerbit Ombak ; 2012.
- Ahmad Syafi’i Ma’arif “Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita” Peny. Ihsan ali Fauzi dan Rizal Pangabean, Jakarta Selatan : Paramadina, 2010.
- Aksin Wijaya, *Menusantarakan Islam; Menelusuri jejak pergumulan Islam yang tak kunjung usai di Nusantara*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2015.
- Daliman, *Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia*, Yogyakarta : Ombak, 2012.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, *23 Januari 1942 dan Nasionalisme Nani Wartabone*, Gorontalo, Pemda Provinsi Gorontalo, 2014.
- Elnino, “Islam dan Peradaban Gorontalo”, dalam Funco, dkk (ed.), *Menggagas Masa Depan Gorontalo*, Yogyakarta : HPMIG Press, 2005.
- Esposito dan John Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim*, Bandung: PT Mizan, 1999.
- Esposito, *Identitas Islam pada perubahan Sosial Politik*, Jakarta; PT Bulan Bintang , 1986.
- Focault dalam Yudi Latif, *Geneologi Intelegensia, Pengetahuan dan Kekuasaan Intelegensia Muslim Indonesia Abad XX*, Jakarta : Kenada Prenada Media Group, 2013.
- Cliford Geertz, *Politik Kebudayaan*, Yogyakarta : Kanisius ,1992.
- HMI Cabang Gorontalo, *Hijau Hitam Gorontalo, Jejak Gerakan dan Pemikiran*, Thariq Modanggu (ed.) Gorontalo: L-Sabda; 2005.
- Tanipu Funco, dkk, *Dari Jogja untuk Gorontalo*, Yogyakarta; HPMIG Press, 2009,
- Idris Rahim, *Identitas Etno-Religius dalam Pembentukan Provinsi Gorontalo*, Disertasi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2010.
- Jeffery A. Winters, *Oligarki*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011.
- Jean Baudrillard dalam Abdillah, *Politik Identitas Etnis , Pergulatan tanda tanpa Identitas*, Magelang: Yayasan Indonesiatera ;2002.
- Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, UIN Maliki Press; Malang, 2008.

Medi Botutihe, *Mo'odelo, sifat dan perilaku pemimpin berdasarkan nilai lokal Gorontalo*, Gorontalo :Pustaka Gorontalo,2006.

Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT Rajawali Press;2014.

Paris Yusuf, *Pembentukan Provinsi Gorontalo dan Dampaknya terhadap ketahanan wilayah*, Tesis , Ilmu Ketahanan National UGM, Yogyakarta , 2000.

Sastro Wantu “*Dinamika Elit Politik Lokal Gorontalo*” dalam *Transformasi Demokrasi Lokal Gorontalo*, Ramli dan Norpin (ed), PT Pustaka Indonesia Press dan Fisip Unisan Gorontalo,2012.

Website

BPS Provinsi Gorontalo dalam <http://gorontalo.bps.go.id/Brs/view/id/372> diakses Jumat 10 Februari 2017.

PSKK UGM dalam <http://cpps.ugm.ac.id/content/siaran-pers-proses-pembangunan-kini-bisa-terukur-ipbk-diy-tertinggi-nasional> di akses Jumat 10 Februari 2017.

Pemerintah Provinsi Gorontalo, Profil Penduduk, <http://www.gorontsloprov.go.id/profil/penduduk>. di akses 11 Januari 2017

www.antarasulsel.com/berita/657/warga-minta-persetujuan-walikota-dan-gubernur-dihentikan, di akses pada Kamis 15 Desember 2016.

Degorontalo.co/dituding-memperkaya-diri-rusli-akan-lapor-adhnan-ke-polisi/,diakses pada Kamis 15 Desember 2016.

<http://cpps.ugm.ac.id/content/siaran-pers-proses-pembangunan-kini-bisa-terukur-ipbk-diy-tertinggi-nasional>.

<http://gorontalo.bps.go.id/Brs/view/id/372> dirilis 5/11/2015

Daftar Responden

No	Nama	Jabatan
1	KH. Gofir Nawawi	Salah satu Pimpinan Pondok Pesantren Salafia,Safiih/Tokoh NU Gorontalo
2	Dr. Sastro.M. Wantu.M.Si	Ilmuwan Politik Lokal Univ Negeri Gorontalo
3	Abdurahman Abubakar Bahmid,Lc	Ketua MUI Provinsi Gorontalo
4	Drs.Kariem Pateda.MM	Ketua Dewan Adat Provinsi Gorontalo
5	Drs.Mustari Sumaga.M.Si	Aktifis Pembentukan Provinsi /Lamahu Palu
6	Drs. Rustam Tilome	Aktifis Pembentukan Provinsi/ Bendahara Presnas
7	Basri Amin.Ph.D	Ilmuwan Sosiologi UNG
8	Ali Mobiliu	Budayawan Gorontalo
9	Elnino Mohi,ST.M.Si	Anggota DPR RI /Politisi Gorontalo/Politisi
10	Thariq Modanggu, S.Pdi, M.Pdi	Politisi/Akademisi
11	Sjafrudin adam,S.Pd,M.Si	Tokoh Jama'ah Tablig Gorontalo
12	Funco Tanipu.ST.MA	Sosiolog UNG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Eka Putra B Santoso, SE.
Tempat/tgl.Lahir : Gorontalo 24 April 1990
Alamat Rumah : Jl. Komite XII, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
Nama Ayah : Asmanu Djaya Saputra
Nama Ibu : Zubaeda Muhammad

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 1 Kota Selatan , Kota Gorontalo lulus tahun 2002
 - b. SMP Negeri 5 Kota Gorontalo lulus tahun 2005
 - c. SMA Negeri 3 Kota Gorontalo lulus tahun 2008
 - d. Universitas Negeri Gorontalo program D3 Adm Perkantoran lulus 2011
 - e. Universitas Ichsan Gorontalo Program S1 Manajemen lulus 2013

C. Riwayat Pekerjaan

1. Jurnalis di Media Publik Group tahun 2011/2012
2. Asisten Dosen Pembantu Rektor IV Universitas Ichsan Gorontalo 2012/2013
3. Pengajar/tentor di Primagama Gorontalo 2012/2015
4. Redaktur Pelaksana di Majalah SMART CITY Pemerintah Kota Gorontalo 2013/2016

D. Prestasi/ Penghargaan

1. Kader Penyuluh anti Narkoba di lingkungan perguruan tinggi BNN Provinsi Gorontalo 2013.

2. Pemateri ‘Latihan dasar kepemimpinan ‘ di forum intelektual mudanera Bima NTB 2016
3. Peringkat 5 besar karya tulis di forum nasional “ Gorontalo Menggugat” dengan tema “ Gorontalo urutan ke lima daerah termiskin di Indonesia tahun 2015

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Training Organisation kader D3 Adm Perkantoran UNG tahun 2009.
2. Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen UNG tahun 2010.
3. Ketua departemen Komunikasi dan Informasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fak. Ekonomi dan Bisnis UNG 2011.
4. Sekretaris Forum Masyarakat Peduli Hutan Gorontalo (FMPHG) tahun 2012
5. Sekretaris Jendral Lembaga Pemantau Peradilan Gorontalo tahun 2013
6. Ketua umum Serikat Mahasiswa Pascasarjana Indonesia Gorontalo 2015/Sekarang.

F. Minat Keilmuan : Politik

G. Karya Ilmiah

1. Artikel
 - a. “Langkah maju ekonomi mikro Gorontalo” artikel di kolom majalah SMART CITY edisi 2 tahun 2013.
 - b. “ Aroma persaingan menuju masyarakat ekonomi ASEAN” artikel majalah SMART CITY edisi 4 tahun 2013
 - c. “ Gorontalo dalam pusaran arus kemiskinan” artikel pada lomba essai “Gorontalo Menggugat” April 2016.
 - d. “Catatan Akhir Tahun ; Kenapa Gorontalo outer ring road harus ditolak” artikel di muat di degorontalo.com, Desember 2015.

- e. “ Trump dan kematian sekulerisme Amerika” artikel di muat di degorontalo.com, November 2016.
- f. “ Babak baru Nasionalisme dan kedaulatan Indonesia, artikel di muat di trendezia.com , Maret 2017.

H. Penelitian

- Pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap produktivitas kerja karyawan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Cabang Gorontalo.

Yogyakarta, 29 Mei 2017

Eka Putra B Santoso,SE